

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Agus Budianto, *Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Pelita Harapan*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)
- Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung: PT. Alumni, 2020)
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada)
- Anthonious Adhi Soediby, *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, STPN Press, 2020)
- Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007)
- Bambang Pujo Purwoko, *Seri Ikhtisar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Banten: CV. Amal Saleh, 2021)
- Daeng Naja, *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)
- Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, (Bogor: Guepedia, 2021)

- Eddy Marek Leks, *Norma Hukum Yang Tidak Adil: Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis dan Robert Alexy*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: KENCANA, 2013)
- Gusri Putra Dodi, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022)
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: Alumni, 2022)
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022)
- Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, (Yogyakarta: Best Publisher, 2009)
- Kurnia Rheza Randy, *Transformasi Digital Kementerian Agraria Dan Tata Ruang: Hak Tanggungan Elektronik*, (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008)
- Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2013)
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Mulada, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Di atasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Novita, dkk, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023)
- Permadi Setyonagoro, *Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan di Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2023)
- Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta, YLBI, 2007)

- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, (Medan: Umsu Press, 2024)
- Salim HS, *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- SK Dekan Fakultas Hukum Nomor: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)
- Suswinamo, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2021)
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Unigres Press, 2022)
- Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, (Sleman: PT. KANISIUS, 2020)
- Udin Narsudin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*, (Yogyakarta: CV. Nas Media Pustaka, 2022)
- Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, (Depok: Kencana, 2017)
- Wardah Yuspin & Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017)

## **Jurnal**

- Andhika Mopeng, “Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. V, No.9 November 2017.
- Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *An-Nisbah*, Vol,03, No.02, 2017.

- Bryan Achmad Effindri, "Penyelesaian Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan atas Nama Orang Lain yang Meninggal Dunia, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, 4 Januari 2024. DOI : <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.432>
- Chandra Adi Gunawan, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, 2023.
- Elfazahra Suardi, dkk, "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai", Jurnal Rectum, Vol.4, No.2, 2022.
- Krisnawan Andiyanto, dkk, "Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru", Vol. 06, No.1, April 2021. DOI: [10.24843/AC.2021.v06.i01.p17](https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p17)
- Mario Julyano dan Aditya Yuli, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 01, 2019.
- Ni Made Indahwati dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat", Vol. 06, No.03 Desember 2021. DOI: [10.24843/AC.2021.v06.i03.p18](https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p18)
- Ni Made Seri Wahyuni Dewi, dkk, "Perjanjian Bank Kredit Dalam Hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tidak Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.1, 2022.
- Nur Azizah, Abdul Halim Barkatullah, Noor Hafidah, "Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik", Notary Law, Vol.1, 2022.
- Shinta Pangesti dan Prilly Priscilia, "Pendaftaran Hak Tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020", Tunas Agraria, No.6, 2023, hal. 73. Doi : <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.216>.
- Siti Halihah, "Asas Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, 2021.
- Tami Rusli, "Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah", Pranata Hukum, Vol.3, 2008.
- Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”,  
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, 2016.

Wieky Rusmanto, “Pelayanan Publik Berbasis Digital Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bandung”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.6, No.4 November 2022. DOI: [10.36312/jisip.v6i4.3904/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/indeks](https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/indeks)

W. Wihandriati, “Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik”, JUSTISI, Vol.9, No.1, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

### **Hasil Penelitian**

Agil Fakilaturahman, “Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia”, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Islam Malang, 2022).

Delia Rizka Sari, Kelemahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Pengikatan Hak Tanggungan”, Master Theses (Notary), Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2017.

### **Website/Internet**

Dukcapil Bontang, “Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik”.

<https://disdukcapil.bontangkota.go.id/component/content/?view=article&id=457:seberapa-pentingkah-nik-data-kependudukan-dan-ktp-elektronik&catid=82&Itemid=464>, diakses pada 07 Mei 2024.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria”, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>, diakses pada 22 Mei 2024.

PT. Bank Mega Syariah, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/agunan>, diakses pada 06 Mei 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, <https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/HakTanggung/Pendaftaran>, diakses pada 10 Februari 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah”. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4660/memeratakan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-pemerintah-dorong-pengembangan-psn-prioritas-di-berbagai-wilayah>, diakses pada 01 Februari 2024.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “E-Government : Inovasi dalam Strategi Komunikasi”. [https://www.setneg.go.id/baca/index/e\\_government\\_inovasi\\_dalam\\_strategi\\_komunikasi](https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi), diakses pada 04 Februari 2024.

Layanan Informasi Online Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, (Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo). <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 20 November 2023.

Media Justitia, “Mengenal Lebih Jauh Jenis-Jenis Kreditur”, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-lebih-jauh-jenis-jenis-kreditur/>, diakses tanggal 19 April 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, “Ikhtisar Perbankan”. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses pada 05 Februari 2024.

Pejabat Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Papua, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi,

<https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>, diakses pada 22 April 2024.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”. [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf), diakses pada 26 Januari 2024, hal.10.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi”, Menteri Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>, diakses pada 19 April 2024.

Salma, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh”, (Yogyakarta: deepublish, 2023), <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, diakses pada 11 Februari 2024.

### **Kamus**

Rocky Marbun, dkk, Kamus Hukum Lengkap, Cetakan 1, (Jakarta: Visimedia, 2012).

### **Wawancara**

Rosita Dewi, S.Si selaku Koordinator Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah Komunal, dan Hubungan Kelembagaan melalui zoom meeting pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024.